

RINGKASAN

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Setiap kabupaten atau kota melaksanakan kebijakan ini. Realisasi capaian kerja PHBS di Kabupaten Indramayu belum berjalan baik sejalan dengan temuan pelaksanaan praktik PHBS Desa Bangkaloa Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses implementasi program perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga di Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Kebijakan publik menjadi catatan saja apabila tidak di implementasikan. Keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dapat dilihat dari perspektif kepatuhan dan apa yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi dengan aspek kepatuhan, banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program, partisipasi terhadap program, dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan metode analisis data interaktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa informan belum memahami pedoman dan prosedur sudah dilakukan walaupun tidak merata. Aktor yang terlibat adalah petugas puskesmas, bidan desa, dan masyarakat. Peran implementor sudah sesuai tetapi belum maksimal. Informan mengerti tujuan program tetapi tidak ada kesesuaian tujuannya. Sudah ada perkembangan program tetapi tidak sejalan dengan fakta dan kendala utama adalah kebiasaan. Partisipasi masyarakat belum baik. Komunikasi dan koordinasi berjalan baik, adanya kompetensi dari implementor, adanya pendanaan tetapi belum optimal, dan kondisi sosial budaya yang melekat sulit menerima arahan dan menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat.

Kesimpulannya adalah implementasi program perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga di Desa Bangkaloa Ilir belum berjalan dengan baik. Hal itu karena kepatuhan dan peran yang tidak maksimal, tidak adanya kesesuaian tujuan serta perkembangan program, partisipasi yang kurang, pendanaan belum optimal, dan budaya masyarakat mengenai kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Implikasi yang dapat dilakukan adalah memahami terlebih dahulu mengenai pedoman pelaksanaan bagi implementor dan pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat mengenai kebiasaan buruk yang ada.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

SUMMARY

The Indonesian government's efforts to improve public health behaviors include the issuance of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 2269/Menkes/Per/XI/2011 concerning Guidelines for Guiding Clean and Healthy Living Behavior. Each district or city implements this policy. The realization of PHBS work achievements in Indramayu District has not gone well in line with the findings of the implementation of PHBS practices in Bangkaloa Ilir Village. The purpose of this study was to describe and analyze the implementation process of the household clean and healthy living behavior program in Bangkaloa Ilir Village, Widasari Subdistrict, Indramayu Regency.

Public policy only becomes a record if it is not implemented. Successful implementation according to Ripley and Franklin can be seen from the perspective of compliance and what happens. Therefore, this research will focus on implementation with aspects of compliance, the number of actors involved, clarity of purpose, development and complexity of the program, participation in the program, and influencing factors.

This research uses qualitative research methods with the determination of informants using purposive sampling. Data collection of interviews, observations, and documentation were analyzed using interactive data analysis methods. This study shows that informants do not understand the guidelines and procedures have been carried out although unevenly. Actors involved are puskesmas officers, village midwives, and the community. The role of the implementor is appropriate but not maximized. Informants understood the program objectives but there was no alignment of objectives. There has been program development but it is not in line with the facts and the main obstacle is habit. Community participation has not been good. Communication and coordination are good, there is competence from the implementers, there is funding but it is not optimal, and the inherent socio-cultural conditions are difficult to accept direction and eliminate the community's bad habits.

The conclusion is that the implementation of the household clean and healthy living behavior program in Bangkaloa Ilir Village has not gone well. This is because compliance and roles are not optimal, there is no compatibility of goals and program development, lack of participation, funding is not optimal, and community culture regarding bad habits is difficult to eliminate. The implication that can be done is to first understand the implementation guidelines for implementers and provide strict sanctions for the community regarding existing bad habits.

Keywords: Public policy, Implementation, Clean and Healthy Living Behavior